

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

TAHUN 2002



SKRIPSI

Oleh :

MARNANDES ELFIAN

00313104

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA
TAHUN 2002**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
Guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata I
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

NAMA : MARNANDES ELFIAN

NIM : 00313104

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2005**

PENGESAHAN

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2002

Nama : MARNANDES.ELFIAN

No.Mahasiswa : 00313104

Yogyakarta, Maret 2005

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing Skripsi,



Agus Widarjono, Drs., MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN
DI INDONESIA TAHUN 2002

Disusun Oleh: **MARANDES ELFIAN**
Nomor mahasiswa: 00313104

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 12 April 2005

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Agus Widarjono, MA

Penguji I : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Penguji II : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si

Agus Widarjono
Diana Wijayanti
Sarastri Mumpuni R

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



[Signature]
Drs. Suwarsono, MA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan Karya Tulis ini Kepada

Yang Tersayang dan Tercinta kedua orang tuaku

Ayahanda Drs. Ramli Al, dan Ibunda Ely Suna

*Atas segala cinta, kasih sayang dan didikan yang tanpa batas, ketabahan,
kesaburan dan doa tulusnya yang selalu menyertaiku*

Adik-Adikku

Meta Putri Utami dan Ade Muhammad Ridwan

Atas segala cinta, kasih sayang, dorongan dan doanya

MOTTO

*“Sesungguhnya sholatku, Ibadahku, hidup dan matiku hanyalah
untuk Allah Tuhan semesta alam”*

(Q.S. Al An'aam : 162)

*“..... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan diantaramu beberapa tingkat
lebih tinggi....”*

(Q.S. Al Mujaadilah : 11)

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain. Dan hanya Tuhanmu hendaknya kamu berharap”*

(Q.S. Alam Nasryah : 6-8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assallamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta salam selalu terucap kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Alhamdulillah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2002”**, yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi UII. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Agus Widarjono, Drs.,MA, selaku dosen pembimbing skripsi, dan juga selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
2. Bapak Drs. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak dan Ibu Karyawan BPS Propinsi DIY yang telah membantu mencari data yang diperlukan.
4. Mas Ismanto sebagai Karyawan program Studi Ekonomi pembangunan yang telah memberikan pelayanan akademik dalam menyelesaikan studi.
5. Buat teman-teman *Agus, Iko, Heri, Dedi, dan Lia ndut*, yang telah bersama-sama berjuang dan berusaha dalam penyusunan skripsi ini.
6. Buat teman-teman EP 2000 dan *Community Of Regional '00, Alis, Agus, Fida, Yati, Hendro, Ela, Sri, Dini, Dhanie, Iwan, Eko, Tika* dan lain-lain yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dan menemani dalam belajar serta bermain.
7. Buat keluargaku tercinta “kedua orang tuaku” yang telah medidikku dengan kesabaran dan kebijaksanaannya dalam mendidik dan untuk kedua adikku Meta dan Ade, belajar yang rajin dan berbakti kepada orang tua.
8. Buat anak-anak kos Reza, Yopi, Yadi, Fubu, Hendro, Finsa, Sony, Ari, Ajis, Daru, Basoer terima kasih atas dorongan dan canda tawanya selama ini.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Buat Kakek, Nenek di Lebong terima kasih atas nasehat dan doanya selama ini, Bibik Wanti dan Mag Idrus makasih atas nasehat dan motifasinya dalam memberikan semangat selama ini.

11. Buat Bik Endah, cepat cari kerja, doaku semoga cepat diberi jodoh.

12. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan, semangat yang sangat berarti yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali ucapan terima kasih. Sebagai penutup, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna sebagaimana mestinya

Wassalammu'alaikum Wr, Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2005

Penulis

MARNANDES ELFIAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	ii
Halaman Berita Acara Ujian Skripsi	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	7

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Negara Indonesia	9
2.2. Keadan Penduduk Indonesia	10
2.2.1. Gambaran Kemiskinan di Indonesia	11
2.2.2. Penduduk Miskin Menurut Popinsi	15

2.3. Tingkat Pendidikan di Indonesia	16
2.4. Tingkat Kesehatan di Indonesia	17
2.5. Kondisi Perekonomian di Indonesia	19
BAB III KAJIAN PUSTAKA	22
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	
4.1. Pembangunan Ekonomi	26
4.2. Pengertian Kemiskinan	27
4.3. Aspek-aspek Kemiskinan	28
4.3.1. Ukuran Kemiskinan	28
4.3.2. Indikator Kesenjangan Distribusi Pendapatan	31
4.3.3. Indeks Pembangunan Manusia	32
4.3.4. Indikator Kesejahteraan Rakyat	33
4.4. Penyebab Kemiskinan	37
4.5. Kebijakan Mengurangi Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan	40
4.6. Hipotesis Penelitian	44
BAB V METODE PENELITIAN	
5.1. Definisi Variabel	45
5.2. Metode Penelitian	46
5.2.1. Metode Analisis Data	46

5.2.2. Uji t Statistik	47
5.2.3. Uji F Statistik	47
5.2.4. Deskripsi R ²	48
5.2.5. Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik	48
5.2.5.1. Autokorelasi	49
5.2.5.2. Multikolinearitas	49
5.2.5.3. Heteroskedastisitas	50
5.3. Jenis dan Sumber Data	50
BAB VI ANALISIS DATA	
6.1. Deskripsi Data	52
6.2. Hasil Analisis Data	53
6.3. Analisis Statistik	54
6.3.1. Uji t Statistik	54
6.3.1.1. Uji t Statistik Variabel Angka Pengangguran Terbuka	55
6.3.1.2. Uji t Statistik Variabel Indeks Pembangunan Manusia	56
6.3.1.3. Uji t Statistik Variabel PDR Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993	56
6.3.2. Pengujian F Statistik	57

6.3.3. R^2 (Koefisien Determinasi)	58
6.4. Pengujian Asumsi Klasik	59
6.4.1. Multikolinearitas	59
6.4.2. Autokorelasi	60
6.4.3. Heteroskedastisitas	61
6.5. Interpretasi Hasil	63
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	
7.1. Kesimpulan	64
7.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator .	
Tahun 1999-2002	5
2.1. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia	
Tahun 2003	9
2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia	
Tahun 2002-2003	11
2.3. Batas Miskin, Persentase, dan Jumlah Penduduk Miskin	
Tahun 1998-2003	14
2.4. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan dan Pedesaan Menurut Propinsi Tahun 2002 dan 2003	15
2.5. Perkembangan PDRB Per Kapita Indonesia Atas Dasar Harga Konstan	
Tahun 1993	20
2.6. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Propinsi	
Tahun 2002 (dalam juta rupiah)	21
6.1. Hasil Regresi	53
6.2. Hasil Uji t Statistik	54
6.3. Hasil Pengujian Multikolinearitas	59
6.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
4.1. Lingkaran Setan Kemiskinan	39
6.1. Kurva Statistik Durbin-Watson	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil-hasil pembangunan dimulai sejak PELITA III. Strategi ini sejalan dengan amanat GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pemerataan dan keadilan sosial pada umumnya, merupakan salah satu dari tujuan utama dari rezim orde baru, sebagaimana dikemukakan dalam Trilogi Pembangunan yaitu menggabungkan tujuan pertumbuhan, stabilitas dan pemerataan. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak diwilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kalori sehari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan jumlah uang tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sedangkan

meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantu berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi di antara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan, walaupun didekati dengan pengeluaran, akan memberi petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga diungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kemiskinan mencerminkan bahwa orang-orang atau manusianya yang menderita miskin dilihat dari berbagai sudut pandang yang menentukan bahwa seseorang itu dikatakan miskin.

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun demikian, karena ciri dan keadaan masyarakat amat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek, sehingga kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan persoalan kelompok ekonomi di tingkat bawah (Swapna Mukhopadhy, 1985). Selain itu, kebijakan dalam negeri seringkali tidak terlepas dengan keadaan yang ada di luar negeri yang secara

tidak langsung mempengaruhi kebijakan antara lain dari segi pendanaan pembangunann (Fredericks, 1985).

Kemiskinan disamping merupakan masalah yng muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, masalah kemiskinan ini bisa selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga para pakar pemikir tentang kemiskinan kebanyakan melihat kemiskinan sebagai masalah struktural yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan, 1980).

Dalam menganalisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering digunakan adalah *head-count ratio* (Po). *Head-count ratio* ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun demikian indikator ini tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P2). Tingkat kedalaman

kemiskinan (*poverty gap index*, P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P2). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan penduduk miskin dari tahun 1999-2002 dari berbagai indikator, jumlah penduduk miskin menurun dari 48,0 juta jiwa pada tahun 1999 menjadi 37,3 juta jiwa pada tahun 2000, atau berkurang sekitar 10,7 juta jiwa. Dalam hal persentase penduduk miskin (Po), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 23,43 persen pada tahun 1999 menjadi 18,95 persen pada tahun 2000. Penurunan persentase penduduk miskin ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, namun penurunan persentase penduduk miskin di perkotaan tampak sedikit lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan menurun 4,83 persen sedangkan penduduk miskin pedesaan menurun 3,89 persen. Dilihat dari segi kedalaman dan keparahan

kemiskinan (P1 dan P2), insiden kemiskinan pada tahun 2000 tampak lebih baik. Selama periode 1999-2000, indeks kedalaman kemiskinan (P1) berkurang dari 3,52 menjadi 1,89 di perkotaan. Pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,98 menjadi 0,51 di perkotaan dan di pedesaan jumlahnya tetap yaitu 1,39. Dilihat dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan (P1 dan P2), insiden kemiskinan pada tahun 2002 untuk daerah perkotaan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2001.

Tabel 1.1.
Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator
1999-2002

Indikator Kemiskinan	1999	2000	Perubahan (%) 1999-2000	2001	2002	Perubahan (%) 2001-2002
1. % Penduduk Miskin (Po)						
Kota	19,41 (15,6)	14,58 (12,1)	-4,83	9,76 (8,5)	14,46 (13,3)	4,7
Desa	26,03 (32,3)	22,14 (25,1)	-3,89	24,95 (28,6)	21,10 (25,1)	-3,85
Kota + Desa	23,43 (48,0)	18,95 (37,3)	-4,48	18,40 (37,1)	18,20 (38,4)	-0,2
2. % Poverty Gap Index (P1)						
Kota	3,52	1,89	-1,63	1,74	2,59	0,85
Desa	4,85	4,68	-0,17	4,68	3,34	-1,34
Kota + Desa	4,33	3,51	-0,82	3,42	3,01	-0,41
3. %Pverty Severity Index (P2)						
Kota	0,98	0,51	-0,47	0,45	0,71	0,26
Desa	1,39	1,39	0	1,36	0,85	-0,51
Kota + Desa	1,23	1,02	-0,21	0,97	0,79	-0,18

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan jumlah penduduk miskin (juta jiwa) tahun 2002 termasuk Estimasi untuk NAD, Maluku, Maluku Utara dan Papua
Sumber : Susenas 1999-2002

Selama periode tahun 2001-2002, indeks kedalaman kemiskinan (P1) meningkat dari 1,74 menjadi 2,59 di perkotaan. Pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan (P2) meningkat dari 0,45 menjadi 0,71 di perkotaan dan di pedesaan menurun dari 1,36 menjadi 0,85.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui peran beberapa faktor terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia oleh karena itu penulis mengambil judul : **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2002”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas ada beberapa masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh angka pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?
2. Seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?
3. Seberapa besar pengaruh PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh angka pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 1993 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis dan bagi pembaca tentang kemiskinan di Indonesia yang mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu negara.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan ekonomi terutama ekonomi pembangunan, sehingga dapat memperkaya penelitian sejenis yang telah ada.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum tentang keadaan negara Indonesia yang diteliti seperti, keadaan penduduk, keadaan penduduk miskin dan keadaan ekonomi Indonesia.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mencakup beberapa penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian sehingga dapat menempatkan penelitian ini ke dalam persepektif yang wajar.

BAB V METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi data-data penelitian, sumber data, metode perhitungan serta model pengujian yang akan dilakukan terhadap data-data yang diperoleh.

BAB VI ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil-hasil regresi dan pengujian yang dilakukan terhadap data yang ada, disertai analisis tentang hasil regresi tersebut.

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Negara Indonesia.

Tabel 2.1.
Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi di Indonesia
Tahun 2003

Propinsi	Luas Area (km ²)	%terhadap Luas Indonesia	Banyaknya Kabupaten	Banyaknya Kota	Banyaknya Kecamatan	Banyaknya Desa
Aceh	51.937	2,75	17	4	227	5.947
Sumatra Utara	73.587	3,89	18	7	314	5.349
Sumatra Barat	42.899	2,27	12	7	146	2.086
Riau	94.560	5,00	13	4	156	4.636
Jambi	53.437	2,83	9	1	71	1.192
Sumatra Selatan	93.083	4,92	10	4	147	2.674
Bengkulu	19.798	1,05	8	1	60	1.162
Lampung	35.384	1,87	8	2	162	2413
Bangka Belitung	16.171	0,86	6	1	36	318
Sumatera	480.847	25,43	101	31	1.319	22.777
DKI Jakarta	664	0,04	1	5	44	267
Jawa Barat	34.597	1,83	16	9	547	5.761
Jawa tengah	32.549	1,72	29	6	360	8.556
DI Yogyakarta	3.186	0,17	4	1	78	438
Jawa timur	47.922	2,53	29	9	645	8.464
Banten	8.651	0,46	4	2	122	1.479
Jawa	127.569	6,75	83	32	1.996	24.965
Bali	5.633	0,30	8	1	55	686
Nusa Tenggara Barat	20.153	1,07	7	2	94	773
Nusa Tenggara Timur	47.351	2,50	15	1	171	2.550
Bali, Nusa Tenggara	73.137	3,87	30	4	320	4.009
Kalimantan Barat	146.807	7,76	10	2	137	1.751
Kalimantan Tengah	153.564	8,12	13	1	88	1.330
Kalimantan Selatan	43.546	2,30	11	2	119	1.946
Kalimantan Timur	230.277	12,18	9	4	110	1.299
Kalimantan	574.194	30,37	43	9	454	6.326
Sulawesi Utara	15.273	0,81	5	3	97	1.204
Sulawesi Tengah	63.678	3,37	9	1	83	1.440
Sulawesi Selatan	62.356	3,30	25	3	285	3.084
Sulawesi Tenggara	38.140	2,02	8	2	112	1.563
Gorontalo	12.215	0,65	4	1	32	377
Sulawesi	191.671	10,14	51	10	609	7.668
Maluku	46.975	2,48	7	2	52	851
Maluku Utara	30.895	1,63	6	2	45	747
Papua	365.466	19,33	27	2	199	3.578
Maluku & Papua	443.336	23,45	40	6	296	5.176
Indonesia	1.890.754	100,00	348	92	4.994	70.921

Sumber: BPS Indonesia.

Indonesia Negara kesatuan yang berbentuk Republik, sejak tahun 2001 dibagi menjadi 30 propinsi dengan 4 tambahan propinsi yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sejak 1999 Timor

Timur tidak lagi merupakan wilayah Indonesia). Pada tahun 2003 propinsi-propinsi tersebut terdiri dari 348 Babupaten, 92 kota, 4.994 Kecamatan dan 70.921 desa. Dilihat dari luas Propinsi yang ada di Indonesia, maka yang terluas adalah Pulau Kalimantan dengan luas 574.194 Km². Sedangkan Propinsi yang memiliki luas wilayah yang paling sempit adalah D.K.I Jakarta dengan luas wilayah 664 km². Gambaran wilayah Indonesia menurut luas daerah dan pembagian daerah administrasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2. Keadaan penduduk Di Indonesia

Jumlah penduduk Indonesia tahun 2002 tercatat 212.003 juta jiwa, dan jumlah penduduk Indonesia tahun 2003 tercatat 215.276 juta jiwa, seperti terlihat pada tabel 2.2. Jumlah penduduk yang begitu besar dan diperkirakan akan terus bertambah tiap tahunnya, jika tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk akan menyebabkan pemusatan penduduk pada pulau-pulau yang kaya akan sumber daya. Sebagian besar penduduk masih terpusat dipulau Jawa, sekitar 59 % penduduk tinggal di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 % penduduk tinggal di Propinsi Jawa Barat, 15 % di Jawa Tengah, dan 17 % di Jawa Timur. Sementara luas pulau Jawa secara keseluruhan hanya sekitar 7 % dari seluruh wilayah daratan Indonesia, ironisnya gabungan Maluku Utara dan Papua yang memiliki luas sekitar 24 % dari luas total Indonesia hanya dihuni 2 %.

Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2002-2003 sangat bervariasi, beberapa propinsi mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk positif dan beberapa propinsi mengalami laju pertumbuhan penduduk negatif, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Tabel 2.2.
Perkembangan Jumlah Penduduk di Indonesia
Tahun 2002-2003

Propinsi	Jumlah Penduduk (Juta)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
	2002	2003	2002-2003
Aceh	4.041	4.240	4,92
Sumatra Utara	11.942	11.923	-0,6
Sumatra Barat	4.298	4.476	4,24
Riau	5.383	5.596	3,96
Jambi	2.407	2.583	7,31
Sumatra Selatan	6.899	6.522	-5,46
Bengkulu	1.564	1.525	-2,5
Lampung	6.731	6.963	3,4
Bangka Belitung	900	988	9,8
DKI Jakarta	8.361	8.640	3,3
Jawa Barat	35.724	38.138	6,8
Jawa Tengah	31.223	32.175	3,0
DI Yogyakarta	3.121	3.211	2,9
Jawa Timur	34.766	36.270	4,3
Banten	8.098	8.999	11,1
Bali	3.15	3.363	6,8
Nusa Tenggara Barat	4.009	4.025	0,4
Nusa Tenggara Timur	3.823	4.094	7,1
Kalimantan Barat	4.016	3.969	-2,2
Kalimantan Tengah	1.855	1.838	-0,9
Kalimantan Selatan	2.984	3.188	6,8
Kalimantan Timur	2.452	2.720	10,9
Sulawesi Utara	2.001	2.136	6,7
Sulawesi Tengah	2.176	2.221	2,1
Sulawesi Selatan	8.051	8.253	2,5
Sulawesi Tenggara	1.82	1.887	3,7
Gorontalo	833	885	6,2
Maluku	1.163	1.224	5,2
Maluku Utara	732	858	17,2
Papua	2.214	2.366	6,9
Indonesia	212.003	215.276	5,1

Sumber : BPS Indonesia

2.2.1. Gambaran Kemiskinan Di Indonesia.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, padahal sebelum terjadinya krisis tersebut jumlah

penduduk miskin di Indonesia terus berkurang, sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 49,5 juta jiwa atau 24,2 %. Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 49,5 juta jiwa pada akhir tahun 1998 tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat adanya krisis ekonomi, melainkan sebagian terjadi karena perubahan standar yang digunakan. Seperti diketahui bahwa standar kemiskinan yang digunakan BPS bersifat dinamis yaitu menyesuaikan dengan perubahan / pergeseran pola konsumsi, namun demikian perubahan standar dari standar 1996 ke 1998 terjadi bukan semata-mata karena pergeseran pola konsumsi, tetapi lebih karena perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan minimum yang dilakukan agar standar kemiskinan dapat mengukur tingkat kemiskinan secara lebih realistis.

Perbaikan ekonomi dan situasi politik yang sedikit membaik pada tahun 1999 telah mempengaruhi jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 sedikit menurun, bila di bandingkan tahun 1998. Standar yang digunakan untuk mengukur kemiskinan tahun 1999 didasarkan pada tahun 1998 (yang telah disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi). Pada Februari tahun 1999 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 48,0 juta orang, dimana sekitar 26,0 % tinggal di daerah pedesaan dan 19,4% di daerah perkotaan. Dibandingkan dengan tahun 1998 jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan sebesar 1,1 %. Penurunan penduduk miskin hanya terjadi di

daerah perkotaan yaitu dari 17,6 juta pada tahun 1998 menjadi 15,7 juta pada tahun 1999 atau mengalami penurunan sebesar 1,9%. Sebaliknya di daerah pedesaan mengalami peningkatan sebesar 0,4 %. sampai Agustus 1999 tingkat kemiskinan telah turun menjadi 37,1 juta jiwa (10,9%), ini terjadi akibat turunnya harga-harga yang berakibat menurunnya garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di daerah perkotaan pada Februari tahun 1999 adalah Rp 92.409 dan Rp 74.272 di daerah pedesaan. Sampai dengan Agustus 1999 garis kemiskinan turun menjadi Rp 89.845 untuk perkotaan dan Rp 69.420 untuk pedesaan. Garis kemiskinan turun karena turunnya harga-harga, terutama harga pangan sejak triwulan II tahun 1999.

Dengan menggunakan data Susenas KOR, dapat diestimasi penduduk miskin pada tahun 2000 dan 2001. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia (termasuk Aceh dan Maluku) tercatat sebesar 38,7 juta atau sekitar 19,14 persen, yang tersebar di perkotaan sebesar 12,3 juta dan pedesaan sebesar 26,4 juta. Garis kemiskinan pada tahun 2000 sebesar Rp 91.632 di perkotaan dan Rp 73.648 di pedesaan. Sementara itu pada tahun 2001 penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 37,9 juta (18,41 %) dimana sebanyak 9,79 juta jiwa tinggal di perkotaan dan 24,84 juta jiwa di pedesaan. Garis kemiskinan pada tahun 2001 sebesar Rp 100.011 di perkotaan dan Rp 80.382 di pedesaan.

Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 38,4 juta jiwa dimana sekitar 21,10 % tinggal di pedesaan dan

14,46 persen tinggal di daerah perkotaan. Pada tahun 2003, jumlah penduduk miskin yang tercatat sekitar 37,3 juta jiwa (17,42 %). Dibanding tahun 2002 jumlah tersebut menurun sekitar 1,1 %, sementara itu, garis kemiskinan tahun 2003 adalah Rp138.803 di perkotaan dan 105.888 di pedesaan. Penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi di daerah perkotaan sementara di daerah pedesaan jumlahnya tetap. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berjumlah 13,3 juta jiwa pada tahun 2003, sementara jumlah penduduk miskin perkotaan tahun 2002 berjumlah 12,2.

Tabel 2.3.
Batas Miskin, Persentase, dan Jumlah Penduduk Miskin¹
Tahun 1998-2003

Tahun	Batas Keiskinan (Rupiah)		Persentase Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (Jutaan)		
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1998 ²	96.959	72.780	21.9	25.7	24.2	17.6	31.9	49.5
1999 ³	92.409	74.272	19.5	26.1	23.5	15.7	32.7	48.4
			(19.4)	(26.0)	(23.4)	(15.6)	(32.3)	(48.0)
1999 ⁴	89.845	69.420	15.1	20.2	18.2	12.4	25.1	37.5
			(15.0)	(20.0)	(18.0)	(12.3)	(24.8)	(37.1)
2000 ⁵	91.632	73.648	14.60	22.38	19.14	12.3	26.4	38.7
2001 ⁶	100.011	80.382	9.79	24.84	18.41	8.6	29.3	37.9
2002 ⁷	130.499	95.512	14.46	21.10	18.20	13.3	25.1	38.4
2003	138.803	105.888	13.57	20.23	17.42	12.2	25.1	37.3

Catatan: 1) Berdasarkan standar 1998 yang disesuaikan dengan pola konsumsi tahun yang bersangkutan.

2) Hasil Susenas Desember 1998

3) Hasil Susenas Februari (reguler)

() Angka tanpa Timor Timur

4) Hasil Susenas Agustus 1999

() Angka tanpa Timor Timur

5) Hasil estimasi termasuk Aceh dan Maluku

6) Hasil estimasi termasuk Aceh

7) Termasuk estimasi 4 provinsi (Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua) yang tidak terkena sampel Susenas Modul Konsumsi 2002.

Sumber: BPS Indonesia.

2.2.2. Penduduk Miskin Menurut Propinsi.

Tabel 2.4.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Perkotaan dan Pedesaan Menurut Propinsi Tahun 2002-2003

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin		Persentase Penduduk Miskin	
	2002 ¹⁾	2003	2002 ¹⁾	2003
Aceh	1.199,9	1.254,2	29,83	29,76
Sumatra Utara	1.883,9	1.883,6	15,84	15,89
Sumatra Barat	496,4	501,1	11,57	11,24
Riau	722,4	751,3	13,61	13,52
Jambi	326,9	327,3	13,18	12,74
Sumatra Selatan	1.600,6	1.397,1	22,32	21,54
Bengkulu	372,4	344,2	22,70	22,69
Lampung	1.650,7	1.568,0	24,05	22,63
Bangka Belitung	106,2	98,2	11,62	10,06
DKI Jakarta	286,9	294,1	3,42	3,42
Jawa Barat	4.938,2	4.889,0	13,38	12,90
Jawa Tengah	7.308,3	6.980,0	23,06	21,78
DI Yogyakarta	635,7	636,8	20,14	19,86
Jawa Timur	7.701,2	7.578,4	21,91	20,94
Banten	786,7	855,8	9,22	9,56
Bali	221,8	246,1	6,89	7,34
Nusa Tenggara Barat	1.145,8	1.054,8	27,76	26,34
Nusa Tenggara Timur	1.206,5	1.166,0	30,74	28,63
Kalimantan Barat	644,2	583,7	15,46	14,79
Kalimantan Tengah	231,4	207,7	11,88	11,37
Kalimantan Selatan	259,8	259,0	8,51	8,16
Kalimantan Timur	313,0	328,6	12,20	12,15
Sulawesi Utara	229,3	191,6	11,22	9,01
Sulawesi Tengah	564,6	509,1	24,89	23,04
Sulawesi Selatan	1.309,2	1.301,8	15,88	15,85
Sulawesi Tenggara	463,8	428,4	24,22	22,84
Gorontalo	274,7	257,7	32,12	29,25
Maluku	418,8	399,9	34,78	32,85
Maluku Utara	110,1	118,8	14,03	13,92
Papua	984,7	917,0	41,80	39,03
Indonesia	38.394,0	37.339,4	18,20	17,42

Catatan : ¹⁾ Termasuk estimasi Propinsi Aceh, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang pada Tahun 2002 Tidak melakukan Susenas Modul Konsumsi.

Sumber : BPS Indonesia.

Selama kurun waktu 2002-2003, perubahan penduduk miskin di beberapa propinsi ada yang mengalami kenaikan dan ada yang mengalami penurunan hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4. Secara absolut, propinsi Banten merupakan propinsi yang mengalami kenaikan penduduk miskin paling banyak, yaitu 6,91 ribu jiwa. Sementara itu, propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi yang mengalami penurunan penduduk miskin paling tinggi, yaitu 328,3 ribu jiwa.

Dilihat dari segi persentase, pada tahun 2003 tercatat sebanyak 13 propinsi (2 di Jawa dan 11 di luar Jawa) memiliki tingkat kemiskinan di atas 20 %. Sementara hanya 5 propinsi (DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara) yang memiliki tingkat kemiskinan kurang dari 10%. Pada priode 2002-2003, penurunan persentase paling tinggi terjadi di propinsi Gorontalo yaitu 2,87 % di susul propinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 2,21%. Sementara itu, kenaikan persentase hanya terjadi di tiga propinsi, yaitu 0,45% di propinsi Bali 0,34% di propinsi Banten dan 0,05% di propinsi Sumatera Utara.

2.3. Tingkat Pendidikan di Indonesia

Salah satu keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Melalui jalur pendidikan, pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA), wajib belajar 9 tahun, UUD 1945 beserta amandemennya (pasal 31 ayat 2) serta program pendidikan lainnya adalah bentuk upaya pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yang pada akhirnya akan tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap bersaing pada era globalisasi. Kualitas pendidikan yang memadai diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan

yang makin bermutu, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta.

Jenjang Sekolah Dasar (SD), pada tahun 2002/2003 memiliki 146.052 sekolah dengan jumlah murid sebanyak 25.918.898 anak dan diasuh oleh 1.234.927 guru, untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yakni SLTP tercatat sebanyak 20.918 sekolah dengan 7.447.270 anak didik yang diasuh oleh 445.830 orang guru.

Jenjang Sekolah Menengah Umum, tercatat sebanyak 222.295 orang guru yang mengajar 3.143.730 siswa yang tersebar pada 8.036 sekolah. Adapun untuk tingkat Sekolah Menengah Kejuruan terdapat 4.943 unit sekolah dengan 2.099.753 siswa yang diajar oleh 142.879 orang guru.

Jenjang perguruan tinggi negeri di Indonesia tercatat sebanyak 78 buah dan jumlah Mahasiswa sebanyak 918.276 termasuk Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN), serta jumlah tenaga Edukatif sebanyak 53.717. Jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat sebanyak 1.846 dan diasuh oleh 156.493 orang dosen.

2.4. Tingkat Kesehatan di Indonesia

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan

menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumberdaya yang memadai seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) dan ketersediaan obat.

Upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu menunjukkan bahwa lebih kurang setengah dari jumlah propinsi mengalami perubahan. Jumlah rumah sakit yang tersedia secara nasional pada tahun 2001 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah puskesmas, menurun dari 7.273 unit pada tahun 2002 menjadi 7.235 unit pada tahun 2003, sedangkan jumlah puskesmas pembantu meningkat dari 21.267 pada tahun 2002 menjadi 21.587 pada tahun 2003. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan karena dengan bantuan mereka banyak kemungkinan penyakit dapat disembuhkan. Menurut data yang ada di Departemen Kesehatan, sepertinya Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan, khususnya dokter umum, dokter ahli dan dokter gigi. Jumlah tenaga kesehatan (dokter ahli, dokter umum, dan dokter gigi), yang ada di Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001.

Akses pelayanan kesehatan lainnya seperti ketersediaan obat diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang diantara lain tersedia pada pedagang besar farmasi dan apotik. Sampai dengan tahun 2003, jumlah pedagang besar farmasi, baik sebagai distributor maupun sebagai penyalur obat-obatan, terus mengalami peningkatan sejak tahun 1997. Demikian pula

dengan jumlah apotik meningkat dari 5.421 buah pada tahun 1997 menjadi 7.832 buah pada tahun 2003.

2.5. Kondisi Perekonomian Indonesia.

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di berbagai bidang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja yang mengarah pada pemerataan pendapatan sebagai perwujudan dari pemerataan pembangunan di setiap daerah. Dari berbagai indikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut mempertebal keyakinan akan kemampuan bersaing dan mendapatkan keuntungan dari era perdagangan bebas yang sebentar lagi akan dimulai. Namun disamping keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut, pada saat ini masih dihadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemerataan. Persoalan *pertama* adalah, masih cukup banyaknya penduduk Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Persoalan *kedua* adalah, masih adanya ketimpangan dalam pemerataan pembangunan. Secara umum pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh pendapatan nasional perkapita, sedangkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk per orang digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dengan cara membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di Indonesia. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Perkembangan PDRB Per kapita Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 1993

Tahun	Nilai (Rp)	Pertumbuhan (%)
1998	1.906.191	-12,82
1999	1.859.289	-1,29
2000	1.978.917	6,43
2001	2.020.942	2,12
2002	2.069.001	2,38

Sumber: BPS Indonesia

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 1998 yaitu Rp 1.906.191 menjadi Rp 2.023.528 di tahun 2001. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari tahun 1998 yaitu sebesar -12,82%, pada tahun 1998 mengalami peningkatan sebesar -1,29%. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita pada tahun 1998 tersebut terjadi dikarenakan setelah krisis pada tahun 1998 pemerintah berupaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian yang terpuruk akibat krisis, hasilnya pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, dan peningkatan tersebut terus berlangsung hingga tahun 2000. Akan tetapi pada tahun 2001 pertumbuhan Produk Domestik Regional (PDRB) per kapita Indonesia mengalami penurunan yaitu sebesar 2,12%. Dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menandakan bahwa Pemerintah perlu lebih peka dalam mengambil tindakan apa yang tepat agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terus meningkat ditahun-tahun mendatang. Dengan menggunakan PDRB per kapita dapat diperoleh gambaran yang lebih

mewakili tingkat kemakmuran kasar pada masing-masing Propinsi. Dalam hal ini tingkat kemakmuran di Indonesia dapat juga dilihat pada nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita tiap Propinsi yang ada di Indonesia.

Tabel 2.6.
PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Propinsi
Tahun 2002
(dalam juta rupiah)

Propinsi	2002	Propinsi	2002
Aceh	2.288.980	Kalimantan Barat	1.800.648
Sumatera Utara	2.170.399	Kalimantan Tengah	2.208.110
Sumatera Barat	1.978.669	Kalimantan Selatan	2.238.922
Riau	4.374.112	Kalimantan Timur	9.469.456
Jambi	1.458.193	KALIMANTAN	3.661.974
Sumatera Selatan	1.764.440	Sulawesi Utara	1.700.810
Bengkulu	1.142.830	Gorontalo	1.155.793
Lampung	1.134.620	Sulawesi Tengah	1.339.082
Bangka Belitung	2.258.702	Sulawesi Selatan	972.155
SUMATERA	2.126.941	Sulawesi Tenggara	1.198.750
DKI Jakarta	7.665.883	SULAWESI	1.306.177
Jawa Barat	1.617.383	Nusa Tenggara Barat	1.191.570
Jawa Tengah	1.376.711	Nusa Tenggara Timur	833.357
DI Yogyakarta	1.693.733	Maluku	1.128.436
Jawa Timur	1.724.759	Maluku Utara	1.206.111
Banten	2.113.633	Papua	3.784.274
JAWA	2.030.411	Lainnya	1.566.491
Bali	2.483.231	Kawasan Barat	2.064.004
JAWA & BALI	2.041.878	Kawasan Timur	2.090.759
		30 Propinsi	2.069.001

Sumber: BPS Indonesia

Tabel 2.6. memberikan gambaran keberhasilan tiap propinsi di Indonesia dalam melaksanakan strategi pelaksanaan pembangunan di masing-masing propinsi. Dengan menggunakan angka-angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebagai dasar, ternyata pertumbuhan masing-masing propinsi di Indonesia sangat bervariasi. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terbesar pada tahun 2002 adalah Propinsi Kalimantan Timur yaitu: Rp 9.469.456 dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terkecil pada tahun 2002 adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp 833.357.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka diarahkan untuk mendapatkan landasan teori dari literatur yang relevan dengan analisis yang digunakan dan dasar-dasar teori dari sumber-sumber yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian yang pernah dilakukan dan dijadikan masukan serta menjadi kajian bagi penelitian ini adalah :

Samsubar Saleh , dalam jurnal Ekonomi Pembangunan menganalisa “ Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia “. Penelitian ini menggunakan model estimasi dengan menggunakan data cross section tahun 1996 dan 1999 dan model estimasi dengan menggunakan data panel. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah untuk investasi sumber daya manusia per kapita, pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik per kapita, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, indeks pengembangan manusia, indeks partisipasi wanita, rasio gini, rasio populasi rumah tangga yang tidak mendapat akses terhadap air bersih, dan Dummy variabel time. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan regional di Indonesia dilakukan dengan pendekatan regresi. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah:

- Hubungan antara tingkat kemiskinan dengan pendapatan perkapita ternyata berpengaruh negatif terhadap rasio kemiskinan per propinsi pada tahun 1996, dan pada tahun 1999 pendapatan perkapita ternyata menjadi tidak signifikan.

- Hubungan antara investasi fisik dan sumber daya manusia oleh pemerintah daerah ternyata tidak berpengaruh dalam menanggulangi kemiskinan di daerah baik pada tahun 1996 maupun tahun 1999.
- Hubungan antara indeks partisipasi wanita dalam ekonomi ternyata belum berpengaruh secara signifikan terhadap rasio kemiskinan.
- Hubungan antara tingkat melek huruf dengan kemiskinan ternyata signifikan dalam menjelaskan kemiskinan antar propinsi.
- Hubungan antara rata-rata lama sekolah dengan kemiskinan ternyata berpengaruh signifikan dalam menjelaskan kemiskinan.
- Hubungan antara rasio gini dengan rasio kemiskinan ternyata berpengaruh signifikan dan positif terhadap rasio kemiskinan pada tahun 1999. Hal ini mengidentifikasi bahwa setelah krisis kenaikan kesenjangan pendapatan akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan.

Hasil yang hampir mirip dengan analisis cross section juga diindikasikan oleh hasil-hasil empirik regresi dengan menggunakan data panel. Disini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel konsistensi pada tahun 1996 dan 1999 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap rasio kemiskinan per propinsi adalah indeks pembangunan manusia (HDI). Dengan menggunakan data panel hasil penelitian yang diperoleh adalah :

- Pendapatan perkapita mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan antar propinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kemiskinan

- Angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, kenaikan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah akan menurunkan tingkat kemiskinan.
- Dengan menggabungkan keempat komponen diatas menjadi indeks pengembangan manusia (HDI), diperoleh hasil yang mengindikasikan signifikannya pengaruh negatif HDI terhadap kemiskinan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara umum akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.
- Investasi sumber daya manusia oleh pemerintah daerah ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Investasi fisik yang dilakukan pemerintah justru signifikan dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa investasi fisik yang dilakukan oleh pemerintah daerah justru meningkatkan kemiskinan.
- Tingkat partisipasi politik dan ekonomi dari perempuan ternyata signifikan namun dengan arah yang positif. Hal ini kemungkinan disebabkan kesenjangan tingkat partisipasi politik dan ekonomi perempuan di sektor-sektor formal dengan sektor- sektor informal yang sebagian besar ditekuni oleh keluarga-keluarga miskin di daerah.
- Populasi penduduk tanpa akses pada fasilitas kesehatan (PNH) ternyata signifikan dan positif pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, kenaikan populasi penduduk akan memperburuk tingkat kemiskinan antar propinsi.

- Pengaruh krisis ekonomi yang dicerminkan variabel beneka waktu (DT) terhadap kemiskinan, ternyata krisis ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan Tahun 1999 lebih tinggi dibandingkan tahun 1996.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan diatas maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang (Lincoln Arsyad, 1999 : 11). Dari definisi diatas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting diantaranya:

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan
3. Kenaikkan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar saling keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dan dianalisis. Dengan cara tersebut bisa diketahui deretan peristiwa yang timbul dan akan mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan GDP/GNP. Jika tingkat pertambahan

GDP/GNP sama dengan atau lebih rendah dari pada tingkat pertambahan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau bahkan menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat (Lincoln Arsyad, 1999 : 12).

4.2. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan itu multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan ; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya baik secara individual maupun kolektif. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap relevan dan penting untuk dikaji dan diupayakan penanggulangannya, kalau tujuan pembangunan nasional yang adil dan merata serta terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang ingin dicapai (Andre Bayo Ala, 1981).

4.3. Aspek-aspek Kemiskinan

4.3.1. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu: *kemiskinan absolut* dan *kemiskinan relatif*.

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara baik. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin dengan demikian kemiskinan diukur dengan memperbandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan, konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 1987). Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim,

tingkat kemajuan suatu negara, dan berbagai faktor ekonomi lainnya, walaupun demikian untuk dapat hidup lebih baik seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Kebutuhan dasar dapat dibagi dalam 2 golongan yaitu kebutuhan dasar yang diperlukan sekali untuk mempertahankan hidupnya dan kebutuhan lain yang lebih tinggi. United Nation research institute for Social Development (UNRISD) menggolongkan kebutuhan dasar manusia atas 3 kelompok yaitu : *pertama*, kebutuhan fisik primer yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan ; *kedua*, kebutuhan kultural yang terdiri dari pendidikan, waktu luang, dan rekreasi serta ketenangan hidup ; *ketiga*, kelebihan pendapatan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi. Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan orang atau keluarga, tetapi juga meliputi kebutuhan fasilitas lingkungan kehidupan manusia, seperti yang dikemukakan oleh International Labor Organization (ILO, 1976) sebagai berikut :

“ Kebutuhan dasar meliputi 2 unsur: pertama, kebutuhan yang meliputi tuntutan minimum tertentu dari suatu keluarga sebagai konsumsi pribadi seperti makanan yang cukup, tempat tinggal, pakaian, juga peralatan dan perlengkapan rumah tangga. Kedua, kebutuhan yang meliputi pelayanan sosial yang diberikan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum yang bersih, pendidikan dan kultural.”.

Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang mudah dimengerti, tetapi penentuan garis kemiskinannya secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak

sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Garis kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum.

b. Kemiskinan Relatif

Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti “ tidak miskin “. Ada ahli yang berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Hal tersebut terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, daripada lingkungan orang yang bersangkutan tinggal (miller. 1971).

Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan absolut. Konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis, sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh karena itu, Kincaid (1975) melihat kemiskinan dari aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antar tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin. Menurut kriteria Bank Dunia : pertama, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatn nasional, maka disebut pembagian pendapatan sangat timpang

: kedua, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidak merataan sedang; dan ketiga, jika 40 persen jumlah penduduk dengan pendapatan terendah tersebut menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan nasional, maka disebut ketidak merataan rendah.

4.3.2. Indikator Kesenjangan Distribusi Pendapatan.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini (*gini ratio*) dan *kriteria* Bank Dunia (BPS, 1994). Nilai *gini ratio* berkisar antara nol dan satu, bila rasio gini sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama, namun bila rasio gini sama dengan satu menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna karena seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang saja, semakin tinggi rasio gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya. Negara-negara yang mengalami *ketidakmerataan tinggi*, koefisien gininya berkisar antara 0,50-0,70; *ketidakmerataan sedang* berkisar antara 0,36-0,49; dan yang mengalami *ketidakmerataan rendah* berkisar antara 0,20-0,35.

Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan

rendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
2. Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan.
3. Rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

4.3.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau human development indeks (HDI) adalah salah satu indikator pengukuran yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. Indeks pembangunan manusia dinyatakan dalam 3 dimensi pembangunan manusia yaitu:

1. Lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir.
2. Pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.
3. Standar hidup yang diukur dari pengeluaran konsumsi per kapita perbulan.

Indeks pembangunan manusia merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut diatas:

$$IPM = \frac{1}{3} [\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3]$$

dimana : X_1 = indeks lamanya hidup

X_2 = indeks tingkat pendidikan yang dirumuskan

Sebagai berikut :

$$X_2 = \frac{1}{3} X_{21} + \frac{2}{3} X_{22}$$

dimana : X_{21} = rata-rata lamanya sekolah

X_{22} = angka melek huruf penduduk usia 15 tahun
keatas

X_3 = indeks tingkat kehidupan yang layak

Penghitungan indeks dari masing-masing indikator tersebut adalah:

$$\text{Indeks } X_{(ij)} = \frac{X_{(ij)} - X_{(i-\min)}}{X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)}}$$

dimana: $X_{(ij)}$ = indikator ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$ = nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$ = nilai maksimum dari X_i

4.3.4. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Selain indikator-indikator diatas, ada berbagai komponen tingkat kesejahteraan lain yang sering digunakan. Pada publikasi UN (1961) yang berjudul *International Definition and Measurement of Levels of Living: An Interim Guide* disarankan 9 komponen kesejahteraan yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan. Keempat komponen yang terakhir sukar diidentifikasi, diukur dan diperbandingkan antar-daerah atau antar-waktu. Oleh karenanya, disini

hanya akan disajikan 4 komponen indikator yaitu : Gizi, kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

1. Keadaan gizi

Indikator utama dalam komponen gizi dan konsumsi yang digunakan dalam menggambarkan taraf hidup penduduk. Dengan kata lain, keadaan gizi yang baik merupakan salah satu tujuan penting dalam upaya meningkatkan mutu hidup penduduk suatu negara. Di Indonesia, berbagai masalah gizi utama yang dihadapi penduduk antara lain:

- a. Kurang kalori protein (KKP)
- b. Anemia zat besi
- c. Kekurangan vitamin A

Masalah kekurangan gizi tersebut terutama mengancam kelompok penduduk umur tertentu seperti: anak dibawah lima tahun, ibu hamil dan menyusui. Masalah-masalah gizi tersebut diatas terutama disebabkan oleh konsumsi makanan dari sebagian penduduk belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya.

Tingkat kecukupan kalori dan protein rata-rata per orang per hari untuk Indonesia adalah sebesar 2100 kalori dan 55 gram protein. Anjuran kecukupan gizi diatas digunakan sebagai dasar perencanaan produksi dan pengadaan pangan serta penilaian tingkat konsumsi pangan dan gizi. Ketidak cukupan konsumsi makanan yang dihitung dalam satuan kalori dan protein akan mempengaruhi tingkat harapan

hidup, mempertinggi tingkat kematian bayi, dan mengurangi ketahanan tubuh terhadap berbagai penyakit (Idrus Jus'at dan Deswani Idrus, 1984).

2. Keadaan kesehatan

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan pokok, karena kesehatan masyarakat yang baik akan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih produktif. Selain itu, kesehatan dapat juga dipakai sebagai ukuran kesejahteraan seseorang. Faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat antara lain adalah rendahnya konsumsi makanan yang bergizi, berkurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitas, dan lingkungan yang tidak memadai. Rendahnya konsumsi makanan yang bergizi akan menyebabkan keadaan kekurangan gizi sehingga menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh terhadap penyakit. Penyediaan sarana kesehatan adalah sebagai kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara umum, sedangkan sanitasi dan lingkungan yang baik tidak saja dapat mengurangi berjangkitnya penyakit menular, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.

Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menggambarkan kesehatan masyarakat adalah persentase penduduk yang sakit selama seminggu yang lalu, persentase penduduk yang sakit menurut tempat pengobatan, angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Indikator-indikator tersebut merupakan indikator

output, sedangkan indikator-indikator input adalah banyaknya dokter per juta penduduk dan banyaknya rumah sakit.

3. Keadaan perumahan

Tinjauan atas tingkat kesejahteraan rakyat dapat dilihat melalui kondisi maupun fasilitas yang dimiliki suatu tempat tinggal. Menurut Sensus Penduduk 1980 dan SUPAS 1985, sebagian besar rumah tangga sudah mendiami rumah milik sendiri namun kondisi maupun fasilitasnya nampak masih belum menggembirakan. Kondisi yang cukup baik hanya nampak pada atap rumah yang umumnya sudah cukup permanent (85%). Jenis dinding, luas lantai maupun jenis lantai tempat tinggal di Indonesia adalah sebagian besar tidak berdinding tembok dengan luas bangunan yang sempit serta masih cukup banyak di antaranya yang berlantai tanah.

Fasilitas yang dimiliki/digunakan rumah tangga di Indonesia juga nampak masih memprihatinkan, sebagian besar masih menggunakan penerangan bukan-listrik, tidak memiliki tempat buang air sendiri serta masih cukup banyak yang menggunakan air sungai dan air hujan untuk keperluan mandi/cuci atau bahkan untuk minum. Hal ini mencerminkan masih rendahnya kualitas tempat tinggal masyarakat yang pada gilirannya akan membawa dampak pada tingkat kesehatannya.

4. Keadaan Pendidikan

Dalam proses pembangunan bangsa, pendidikan dipandang sangat vital karena tingkat pendidikan penduduk sering dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Negara yang mempunyai penduduk dengan rata-rata pendidikan rendah biasanya disebut negara sedang berkembang.

Menyadari hal tersebut, sejak pelita I pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Upaya tersebut berupa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan sehingga dapat memperluas jangkauan pelayanan dan kesempatan memperoleh pendidikan di antaranya melalui program wajib belajar.

4.4. Penyebab Kemiskinan.

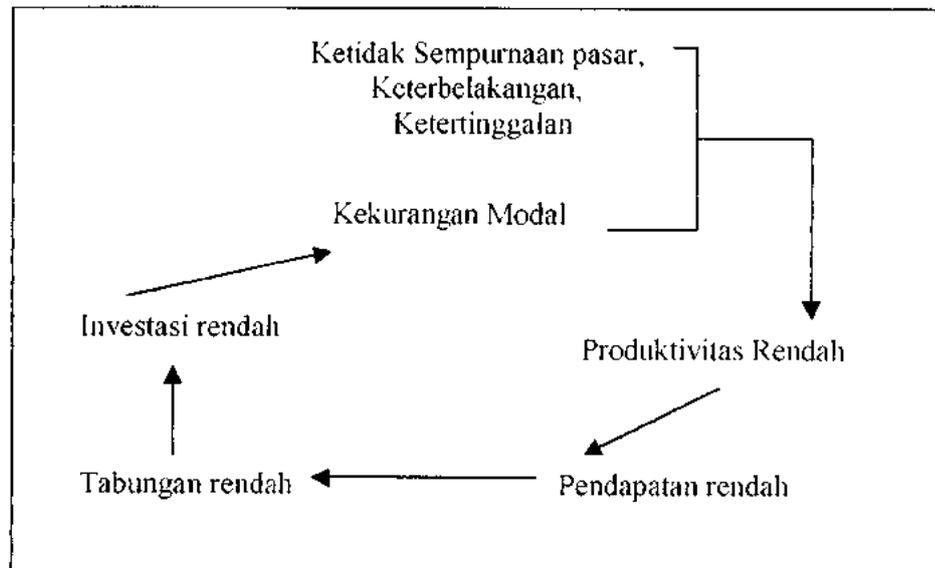
Ada banyak penjelasan mengenai sebab-sebab kemiskinan. Kemiskinan masal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah perang dunia II memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya. Penduduk negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode produksi yang tradisional, yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Sharp, et.al (1996:h.173-191) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi yaitu:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya *ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya* yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam *kualitas sumberdaya manusia*. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat *perbedaan akses dalam modal*.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya hal ini dapat dilihat pada gambar 4.1. Logika berpikir ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953 yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 4.1.
Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)



Sumber: R.Nurkse (1953)

Negara berkembang sampai kini masih saja memiliki ciri-ciri terutama sulitnya mengelola pasar dalam negerinya menjadi pasar persaingan yang lebih sempurna. Ketika mereka tidak dapat mengelola pembangunan ekonomi, maka kecenderungan kekurangan modal dapat terjadi diikuti dengan rendahnya produktifitas, turunnya pendapatan riil, rendahnya tabungan, dan investasi mengalami penurunan sehingga melingkar ulang menuju keadaan kurangnya modal, Demikian seterusnya, berputar. Oleh karena itu, setiap usaha memerangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkap kemiskinan ini.

4.5. Kebijakan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan

Menurut Abdul Hakim usaha-usaha pemberdayaan manusia agar terbebas dari belenggu kemiskinan sudah lama dirintis oleh pemerintah Indonesia. Berikut ini beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan:

1. Kapital dan kredit

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia para penduduk miskin hidup dari menjual tenaganya dan si kaya dari *return* kepemilikan properti mereka. Kemiskinan penduduk miskin – seperti yang telah diterangkan dalam teori lingkaran setan kemiskinan – turut membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi, seperti kemampuan untuk membeli varitas bibit baru, pupuk buatan, peralatan pertanian modern, atau mengirim anak-anak mereka ke sekolah yang bagus, yang akan berujung pada kekalnya kemiskinan mereka. Upaya-upaya pemerintah menyediakan kredit untuk kaum miskin tidak banyak berhasil karena berbagai hal antara lain adalah:

- a. Pinjaman – meskipun pinjaman publik – tetap saja memerlukan jaminan, dan masyarakat miskin jarang yang bisa memenuhinya.
- b. Pinjaman yang tersalur kebanyakann macet karena kemampuan pinjaman yang rendah dalam mengembalikan pinjaman.

- c. Kredit bersubsidi sering kali tidak jatuh ke tangan kaum miskin akan tetapi lebih pada kelompok-kelompok yang tidak seharusnya.

Meskipun demikian terdapat beberapa contoh sukses dalam hal ini, misalnya Badan Kredit Kecamatan, Kupedes untuk para pengusaha kecil, pembangunan pertanian, pengadaan infrastruktur, dan program Inpres Desa tertinggal.

2. Pendidikan dan Training

Masyarakat yang memiliki properti, memegang posisi penting, dan mempunyai pendidikan yang lebih baik pada wal pembangunan akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi di tahap-tahap pembangunan berikutnya. Sebaliknya masyarakat yang miskin aset, tidak punya posisi penting dalam perekonomian, serta pendidikan yang kurang akan cenderung gagal meningkatkan pendapatannya pada tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Investasi dalam pendidikan, training, dan bentuk-bentuk human capital lainnya akan menghasilkan aliran pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar dan universal yang gratis merupakan jalan utama meredistribusi human capital untuk keuntungan bagi mereka yang relatif miskin

3. Program Perluasan Kesempatan Kerja.

Pengangguran, fenomena besar di perkotaan negara-negara berkembang, mempunyai pengaruh langsung pada distribusi pendapatan. Beberapa kebijakan telah dibuat untuk mengurangi pengangguran diantaranya adalah ekspansi industri, skema perluasan kesempatan kerja publik, produksi yang lebih padat karya di sektor manufaktur, pengurangan distorsi harga faktor produksi, pembangunan ekonomi dan jasa sosial yang lebih besar di daerah pedesaan, sistem pendidikan yang lebih relevan, konsisten yang lebih tinggi antara kebijakan pendidikan dengan perencanaan ekonomi, dan optimasi mekanisme pasar dalam penentuan tingkat harga dan upah.

4. Kesehatan dan Nutrisi

Kondisi tidak sehat dan kekurangan makanan membatasi kesempatan para pekerja untuk memperoleh nafkah. Subsidi pangan dan kesehatan akan meningkatkan pendapatan kaum miskin, meningkatkan kesehatan dan nutrisi, memungkinkan orang untuk bekerja lebih lama dalam seharinya, dan meningkatkan efektifitas kerjanya. Negara-negara berkembang telah berupaya meningkatkan efisiensi dengan menggeser dana dari pengobatan kuratif di rumah sakit perkotaan yang mahal kepada jasa kesehatan dasar seperti upaya preventif, informasi kesehatan sederhana, lingkungan yang sehat, dan pengobatan alternatif.

5. Perang yang Terintegrasi terhadap kemiskinan.

Sebuah studi yang dilakukan Irma Adelman dan Sherman Robinson mengindikasikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan sepotong-sepotong sulit untuk bisa mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang muncul dari proses pembangunan. Hanya mobilisasi total kebijakan pemerintah terhadap program-program menolong kaum miskin secara langsung yaitu sebuah perang terhadap kemiskinan yang akan berhasil mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan meningkatkan pendapatan absolut.

6. Riset dan Teknologi

Manfaat riset dan teknologi baru dalam mengurangi kemiskinan lebih tampak di pertanian. Pengenalan varitas unggul, dan Revolusi hijau telah meningkatkan suplai makanan dan mengurangi harga makanan bagi kaum miskin, dan meningkatkan tingkat upah.

7. Migrasi

Proses pembangunan lebih banyak menciptakan pekerjaan sektor industri di perkotaan, sehingga orang-orang pindah ke kota. Standar kehidupan migran tersebut, meskipun rendah cenderung berada di atas teman-temannya yang miskin yang tinggal di pedesaan. Pada umumnya para pekerja kota mengirim uangnya ke rumah sehingga meningkatkan kesejahteraan kaum miskin di pedesaan. Yang harus di hindarkan adalah jumlah migrasi yang melebihi kapasitas sosial.

4.6. Hipotesis Penelitian

1. Di duga ada pengaruh signifikan dan positif antara angka pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Di duga ada pengaruh signifikan dan negatif antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Diduga ada pengaruh signifikan dan negatif antara PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
4. Di duga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Definisi Variabel

1. Angka pengangguran terbuka adalah persentase yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Data yang digunakan adalah data angka pengangguran terbuka tahun 2002 yang dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari buku Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2003.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator pengukuran yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu negara. Indeks pembangunan manusia dinyatakan dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu: lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, dan standar hidup yang diukur dari pengeluaran konsumsi perkapita perbulan. Data yang digunakan adalah data IPM tahun 2002 yang dinyatakan dalam persen. Data ini diperoleh dari buku Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2003.
3. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 adalah gambaran pendapatan masyarakat secara umum setiap penduduk Indonesia. Data yang digunakan adalah data PDRB perkapita atas dasar tahun 1993 yang dinyatakan dalam puluhan ribu rupiah. Data ini diperoleh dari buku Statistik Indonesia tahun 2003.

5.2. Metode Penelitian

Untuk mempermudah tahap-tahap dan tujuan penelitian yang diinginkan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

5.2.1. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah alat analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*), dengan fungsi Tingkat kemiskinan = f (angka harapan hidup, pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993), maka model persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{LN}X_1 + \beta_2 \text{LN}X_2 + \beta_3 \text{LN}X_3 + e$$

Keterangan :

$\text{LN}Y$ = Tingkat kemiskinan (persentase)

$\text{LN}X_1$ = Pengangguran terbuka (persentase)

$\text{LN}X_2$ = Indeks pembangunan manusia (persentase)

$\text{LN}X_3$ = PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993

β_0 = Konstanta regresi.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

e = kesalahan pengganggu

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian :

5.2.2. Uji t statistik

Uji t statistik melihat hubungan antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :

a. Jika Hipotesis positif

$$H_0 : \beta_i < 0$$

$$H_a : \beta_i > 0$$

b. Jika Hipotesis negatif

$$H_0 : \beta_i > 0$$

$$H_a : \beta_i < 0$$

2. Pengujian satu sisi

Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$, H_0 diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$, H_0 ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

(Gujarati, 1999: 73-75).

5.2.3. Uji F statistik

Akan dilihat hubungan antara variabel bebas secara bersamaan, yaitu dengan cara sebagai berikut :

$H_0 : \beta_i = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen.

$H_a : \beta_i \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

H_0 diterima (tidak signifikan) jika $F_{hitung} < F_{tabel} (df = n - k)$

H_a ditolak (signifikan) jika $F_{hitung} > F_{tabel} (df = n - k)$

Dimana :

k = jumlah variabel

n = jumlah pengamatan (Gujarati, 1999 : 81-82)

5.2.4. Deskripsi R^2 (Koefisien Determinasi)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.

Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai dengan 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel yang menjelaskan (Damodar Gujarati, 1999 : 98).

5.2.5. Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan

asumsi klasik tersebut harus dilakukan, meliputi uji multikolinearitas, autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

5.2.5.1. Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson* (DW), yaitu dengan cara menentukan besarnya nilai kritis dari d_u dan d_l berdasarkan jumlah observasinya dari variabel independen. Jika H_0 menyatakan tidak adanya autokorelasi maka :

- a). Jika $DW < d_l$, maka H_0 ditolak yang berarti suatu persamaan regresi tersebut terkena autokorelasi.
- b). Jika $DW > 4-d_l$, maka H_0 ditolak yang berarti suatu persamaan regresi tersebut terkena autokorelasi.
- c). Jika $d_u < DW < 4-d_u$, maka H_0 diterima yang berarti suatu persamaan regresi tersebut tidak terkena autokorelasi.

5.2.5.2. Multikolinearitas

Adalah hubungan yang terjadi di antara variabel-variabel independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial, (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) regresi awal atau yang disebut dengan metode *Klein rule of Thumbs*. Jika $r^2 < R^2$ maka tidak ada multikolinearitas.

5.2.5.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah hubungan antara nilai residual dengan variabel bebas dalam regresi. Jika terdapat hubungan ini maka nilai residual akan berperilaku teratur dan tidak random. Implikasi berikutnya adalah nilai varian residual akan meningkat dan tidak konstan, sehingga dampak yang terjadi adalah nilai-nilai parameter uji statistik semakin kecil.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan *uji gletser*, yaitu dengan melakukan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteros. Setelah mendapatkan residual e_i dari regresi OLS, selanjutnya melakukan regresi nilai absolut dari e_i yaitu $|e_i|$ terhadap variabel independen. Apabila nilai t -tabel $>$ t -hitung berarti tidak ada heteroskedastisitas, tetapi jika nilai t -tabel $<$ t -hitung maka terdapat heteroskedastisitas.

5.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat sekunder. Data sekunder ini adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengelolanya atau data yang sudah tersedia karena sebelumnya sudah diteliti oleh lembaga atau organisasi tertentu. Data ini berupa data cross section tahun 2002. Data-data diperoleh dari kantor BPS

Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB VI

ANALISIS DATA

6.1. Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dan studi kepustakaan. Data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu: Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2003. Analisis data akan berkisar pada pembahasan hasil studi empiris model OLS dengan metode regresi log linier serta melihat asumsi-asumsi klasik dari model regresi log linier terpilih, yang meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan serta faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan digunakan model regresi yaitu log linier, model log linier dipilih berdasarkan hasil dari MWD test, yang mana dari hasil MWD test tersebut dapat di simpulkan bahwa penggunaan model log linier maupun model linier sama baiknya, karena baik Z_1 maupun Z_2 tidak signifikan secara statistik dengan $\alpha = 5\%$.

Rumus yang digunakan:

$$\text{LNY} = f(\text{LNX}_1, \text{LNX}_2, \text{LNX}_3)$$

$$\text{LNY} = \beta_0 + \beta_1 \text{LNX}_1 + \beta_2 \text{LNX}_2 + \beta_3 \text{LNX}_3 + e$$

Keterangan Variabel :

LNY = Tingkat Kemiskinan

LNX₁ = Pengangguran Terbuka

$LN X_2$ = Indeks Pembangunan Manusia

$LN X_3$ = PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993.

β_0 = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien dari masing-masing variabel

e = Kesalahan pengganggu

6.2. Hasil Analisis Data

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews, hal ini dimaksud untuk mempermudah proses penghitungan dan mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia (*human error*). Hasil regresi menggunakan OLS dengan perangkat Eviews dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Hasil Regresi

Dependent Variable: LNY
Method: Least Squares
Date: 03/17/05 Time: 09:48
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN X1	0.331028	0.144621	2.288928	0.0305
LN X2	-5.188317	1.531756	-3.387168	0.0023
LN X3	-0.368484	0.149024	-2.472655	0.0203
C	29.22503	5.655642	5.167411	0.0000
R-squared	0.572649	Mean dependent var		2.814708
Adjusted R-squared	0.523339	S.D. dependent var		0.542349
S.E. of regression	0.374441	Akaike info criterion		0.996801
Sum squared resid	3.645358	Schwarz criterion		1.183627
Log likelihood	-10.95201	F-statistic		11.61329
Durbin-Watson stat	1.956007	Prob(F-statistic)		0.000052

6.3. Analisis Statistik

Analisis di sini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh apakah variabel-variabel independen berpengaruh dan signifikan terhadap variabel dependen. Maka, variabel independen tersebut akan diteliti dengan menggunakan uji t secara individual (t-test), uji F dan uji R².

6.3.1. Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel.

$$t\text{-tabel} = \{\alpha ; df(n-k)\}$$

$$t\text{-hitung} = \frac{b_i}{Se(b_i)}$$

Dimana :

α = *Level of significance*, atau probabilitas (peluang)

n = Jumlah sampel yang diteliti

k = Jumlah variabel independen termasuk konstanta

Se = Standar error

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan $\alpha = 0,05$.

Jika t-tabel < t-hitung berarti Ho ditolak atau variabel Xi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-tabel \geq t-hitung

berarti H_0 diterima atau variabel X_i tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 6.2.
Hasil Uji t-Statistik

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel
LN X_1	0,331028	2,288928	1,706
LN X_2	-5,188317	-3,387168	1,706
LN X_3	-0,368484	-2,472655	1,706

Sumber : Data diolah

6.3.1.1. Uji t-Statistik Variabel Angka Pengangguran Terbuka (X_1)

Hipotesis pengaruh variabel X_1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- $H_0: \beta_1 \leq 0$, berarti variabel independen X_1 tidak berpengaruh atau berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.
- $H_a: \beta_1 > 0$, berarti variabel independen X_1 berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_1 = 2,288928$, sedangkan t-tabel = 1,706 (df = 26, $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung > t-tabel ($2,288928 > 1,706$).

Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, menandakan bahwa variabel X_1 berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis bahwa variabel angka pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan diterima.

6.3.1.2. Uji t-Statistik Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X_2)

Hipotesis pengaruh variabel X_2 terhadap variabel dependen digunakan adalah :

- $H_0: \beta_2 \geq 0$, berarti variabel independen X_2 tidak berpengaruh atau berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.
- $H_a: \beta_2 < 0$, berarti variabel independen X_2 berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_2 = -3,387168$, sedangkan t-tabel 1,706 ($df = 26, \alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel ($-3,387168 < 1,706$).

Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel yang dikarenakan nilai t-hitung negatif, menandakan bahwa variabel X_2 berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan diterima.

6.3.1.3. Uji t-Statistik Variabel PDRB per kapita atas dasar harga konstan 1993 (X_3).

Hipotesis pengaruh variabel X_3 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah:

- $H_0: \beta_3 \geq 0$, berarti variabel independen X_3 tidak berpengaruh atau berpengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen.

- $H_a: \beta_3 < 0$, berarti variabel independen X_3 berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_3 = -2,472655$, sedangkan t-tabel = 1,706 (df = 26, $\alpha = 0,05$), sehingga t-hitung < t-tabel ($-2,472655 < 1,706$).

Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, yang dikarenakan nilai t-hitung negatif, menandakan bahwa variabel X_3 berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis bahwa variabel PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan diterima.

6.3.2. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel.

$$F\text{-hitung} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

$$F\text{-tabel} = (F_{\alpha; k-1, n-k})$$

Jika $F\text{-tabel} < F\text{-hitung}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika $F\text{-tabel} \geq F\text{-hitung}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah:

- $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- $H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah f -hitung = 11,61329, sedangkan F -tabel = 2,98 ($\alpha = 0,05$; 26, 3), sehingga F -hitung > F -tabel ($11,61329 > 2,98$).

Perbandingan antara F -hitung dengan F -tabel yang menunjukkan bahwa F -hitung > F -tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga hipotesis bahwa variabel angka pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan diterima.

6.3.3. R^2 (Koefisien Determinasi)

Pengujian R^2 ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi dalam variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu angka pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan persentase rumah tangga dengan lantai terluas

dari tanah . Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan cara melihat R^2 (koefisien determinasi) dari hasil regresi model OLS yang dilakukan.

Dari perhitungan regresi, diperoleh nilai R^2 sama dengan 0,572649, hal tersebut berarti bahwa 57% variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (angka pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993) sedangkan sisanya tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut.

6.4. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

6.4.1. Multikolinearitas.

Multikolinearitas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu merupakan fungsi dari variabel independen yang lain. Pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak ada multikolinearitas , dan jika r^2 lebih besar dari R^2 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 6.3.
Hasil Pengujian Multikolinearitas

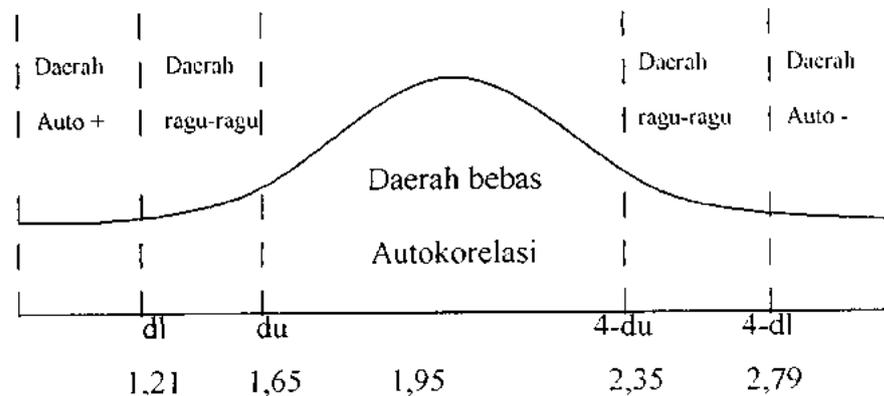
Variabel	r^2	R^2	Keterangan
$LN X_1 - LN X_2$	0,026332	0,572649	Tidak ada Multikolinearitas
$LN X_1 - LN X_3$	0,082259	0,572649	Tidak ada Multikolinearitas
$LN X_2 - LN X_3$	0,261063	0,572649	Tidak ada Multikolinearitas

Sumber : Data diolah

Hasil correlation matrix diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas, dimana seluruh nilai r^2 lebih kecil dibandingkan dengan nilai R^2 .

6.4.2. Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan. Pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), dimana dengan membandingkan nilai DW-statistik dengan d_U dan d_L , dimana nilai d_U dan d_L didapatkan dari tabel DW dengan memperhatikan jumlah variabel independen (k), tingkat signifikansi (α) serta banyaknya observasi (n). DW- statistik yang diperoleh dari hasil regresi sebesar 1,98, sedangkan nilai DW-tabel dengan $\alpha = 0,05$, $k = 3$ dan $n = 30$ di dapat nilai $d_L = 1,21$ dan $d_U = 1,65$.



Gambar 6.1.

Kurva Statistik Durbin-Watson

Maka dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa analisis ini tidak terdapat masalah autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif dilihat dari DW-statistik berada di daerah bebas autokorelasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam analisa ini tidak terdapat autokorelasi.

6.4.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika variabel gangguan mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya heteroskedastisitas ini yaitu uji signifikan (uji T dan F) menjadi tidak tepat dan koefisien regresi menjadi tidak mempunyai varian yang minimum walaupun penaksiran tersebut penaksiran tetap tidak bias tetapi tidak efisien.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji Gletser, yaitu dengan cara meregresi nilai residu yang telah diabsolutkan dengan variabel independen.

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut :

a) Hipotesis pengujian adalah sebagai berikut :

Terima H_0 : tidak terdapat Heteroskedastisitas

Tolak H_a : Terdapat Heteroskedastisitas

b) Menentukan t tabel

$$\begin{aligned} t \text{ tabel} &= \alpha; df(n-k) \\ &= 0,05; 30 - 4 \\ &= 1,706 \end{aligned}$$

c) Kesimpulan pengujian :

Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t-tabel, maka H_a diterima, terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya apabila nilai t-hitung lebih kecil dari pada nilai t-tabel, maka H_0 diterima dikatakan tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model. Pada tabel di bawah ini menyajikan hasil pengujian terhadap masalah heteroskedastisitas :

Tabel 6.4.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t-Hitung	</>	t-Tabel	Kesimpulan
Residu;X1	0,623733	<	1,706	Homokedastisitas
Residu;X2	0,495390	<	1,706	Homokedastisitas
Residu;X3	1,513397	<	1,706	Homokedastisitas

Sumber : Data diolah

Hasil perhitungan dengan uji Gletser didapat bahwa semua variabel memiliki t-hitung < t-tabel (1,706) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

6.5. Interpretasi Hasil

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\text{LNY} = 29,22503 + 0,331028 \text{ LNX}_1 - 5,188317 \text{ LNX}_2 - 0,368484 \text{ LNX}_3$$

Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 29,22503, ini berarti jika seluruh variabel independen yaitu angka pengangguran terbuka (LNX1), indeks pembangunan manusia (LNX2), serta PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun1993 (LNX3), sama dengan nol maka variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan (LNY) akan meningkat sebesar 29,22503 persen.
2. Koefisien angka pengangguran terbuka sebesar 0,331028, ini berarti bahwa setiap kenaikan angka pengangguran terbuka sebesar 1 orang akan berakibat pada kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 33,1028 persen.
3. Koefisien indeks pembangunan manusia sebesar $-5,188317$, ini berarti bahwa setiap penurunan indeks pembangunan manusia sebesar 1 skala akan berakibat menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 5,188317 persen.
4. Koefisien PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun1993 sebesar $-0,418111$, ini berarti bahwa setiap penurunan PDRB Per kapita atas dasar harga konstan tahun1993 sebesar 1 persen akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0,418111 persen.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Dari hasil pengujian secara keseluruhan (Uji F), nilai F hitung sebesar 11,61329 lebih besar dari F tabel 2,98 ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi perubahan variabel dependen.
2. Tanda parameter koefisien regresi untuk angka pengangguran terbuka adalah positif terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya adalah dengan adanya kenaikan angka pengangguran terbuka akan menaikkan tingkat kemiskinan.
3. Tanda parameter koefisien regresi untuk indeks pembangunan manusia adalah negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya adalah dengan adanya penurunan indeks pembangunan manusia akan menaikkan tingkat kemiskinan.
4. Tanda parameter koefisien regresi untuk PDRB per kapita atas dasar tahun 1993 adalah negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang artinya adalah dengan adanya penurunan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 akan menaikkan tingkat kemiskinan.

7.2. Saran

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus serius diperhatikan oleh pemerintah karena Indonesia negara yang sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar kelima di dunia. Dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2002 sebesar 212.003 juta orang tersebut sekitar 38.394 juta orang masih di bawah garis kemiskinan, masih banyaknya penduduk miskin tersebut jika tidak ditangulangi akan terus bertambah di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia sebaiknya :

1. Pemerintah sebaiknya membuka lapangan-lapangan kerja baru, yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga banyak penduduk yang dapat memiliki pendapatan yang layak, sehingga mengurangi penduduk yang menganggur, dan pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan.
2. Pemerintah sebaiknya perlu meningkatkan sistem pendidikan yang lebih baik, pendirian-pendirian puskesmas atau rumah-rumah sakit baru serta peningkatan jumlah dokter-dokter yang dapat membantu masyarakat dilapisan masyarakat yang kurang mampu.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 negatif yang artinya bahwa penurunan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993 akan meningkatkan kemiskinan, untuk itu pemerintah Indonesia hendaknya berupaya untuk meningkatkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 1993, sehingga dapat mengurangi penduduk yang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim , *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 1. Ekonesia Yogyakarta, 2002.
- Badan Pusat Statistik, *Indonesia dalam angka*, BPS, 2003.
- , *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, BPS, 2002.
- , *Data dan Informasi Kemiskinan*, BPS Jakarta, 2003.
- Damodar Gujarati, *Ekonometrika Dasar*, alih bahasa : Sumarno Zain, Erlangga Jakarta, 1995.
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 2. YKPN Yogyakarta, 1996.
- Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan Teori masalah dan kebijakan*, Edisi 1. UPP AMP YKPN Yogyakarta, 1999.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Rineka cipta Jakarta, 1997.
- Samsubar Saleh (2002), "Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemsikinan Regional di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume VII, No.2, 87-101.

L A M P I R A N

Propinsi	Y	X1	X2	X3
Aceh	29.83	16.35	66.00	2288980
Sumatera Utara	15.84	6.72	68.75	2170399
Sumatera Barat	11.57	6.06	67.53	1978669
Riau	13.61	8.22	69.11	4374112
Jambi	13.18	5.93	67.13	1458193
Sumatera Selatan	22.32	5.82	65.95	1764440
Bengkulu	22.7	4.29	66.22	1142830
Lampung	24.05	5.53	65.83	1134620
Bangka Belitung	11.62	5.2	65.37	2258702
DKI Jakarta	3.42	11.53	75.62	7665883
Jawa Barat	13.38	9.87	65.83	1617383
Jawa Tengah	23.06	6.25	66.29	1376711
DI Yogyakarta	20.14	4.7	70.76	1693733
Jawa Timur	21.91	5.37	64.1	1724759
Banten	9.22	10.32	66.63	2113633
Bali	6.89	3.51	67.49	2483231
Nusa Tenggara Barat	27.76	5.15	57.82	1191570
Nusa Tenggara Timur	30.74	2.82	60.32	833357
Kalimantan Barat	15.46	4.81	62.87	1800648
Kalimantan Tengah	11.88	5.67	69.09	2208110
Kalimantan Selatan	8.51	4.44	64.3	2238922
Kalimantan Timur	12.2	8.89	69.96	9469456
Sulawesi Utara	11.22	10.47	71.33	1700810
Sulawesi Tengah	24.89	5.54	64.41	1155793
Sulawesi Selatan	15.88	7.12	65.31	1339082
Sulawesi Tenggara	24.22	6.04	64.09	972155
Gorontalo	32.12	9.28	64.13	1198750
Maluku	34.78	21.22	66.45	1128436
Maluku Utara	14.03	15.81	65.82	1206111
Papua	41.8	21.76	60.10	3784274

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan (%)

X1 = Angka Pengangguran Terbuka (%)

X2 = Indek Pembangunan Manusia (Skala 0-100)

X3 = PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
(Rupiah)

MWD Test

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 03/22/05 Time: 08:18
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.851488	0.246734	3.451033	0.0020
X2	-1.579643	0.390965	-4.040364	0.0004
X3	-5.85E-07	7.27E-07	-0.805519	0.4281
Z1	-11.69718	8.427230	-1.388022	0.1774
C	118.3982	25.31678	4.676669	0.0001
R-squared	0.598304	Mean dependent var	18.94100	
Adjusted R-squared	0.534033	S.D. dependent var	9.144076	
S.E. of regression	6.241909	Akaike info criterion	6.651461	
Sum squared resid	974.0357	Schwarz criterion	6.884994	
Log likelihood	-94.77191	F-statistic	9.309040	
Durbin-Watson stat	2.068095	Prob(F-statistic)	0.000095	

Dependent Variable: LNY
 Method: Least Squares
 Date: 03/22/05 Time: 08:19
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNx1	0.313713	0.156294	2.007196	0.0557
LNx2	-5.067934	1.601092	-3.165299	0.0040
LNx3	-0.391033	0.166416	-2.349733	0.0270
Z2	-0.011345	0.034484	-0.329001	0.7449
C	29.06935	5.774619	5.033985	0.0000
R-squared	0.574491	Mean dependent var	2.814708	
Adjusted R-squared	0.506409	S.D. dependent var	0.542349	
S.E. of regression	0.381032	Akaike info criterion	1.059147	
Sum squared resid	3.629643	Schwarz criterion	1.292680	
Log likelihood	-10.88721	F-statistic	8.438289	
Durbin-Watson stat	1.996289	Prob(F-statistic)	0.000188	

Hasil Regresi

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 03/17/05 Time: 09:48

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX1	0.331028	0.144621	2.288928	0.0305
LNX2	-5.188317	1.531756	-3.387168	0.0023
LNX3	-0.368484	0.149024	-2.472655	0.0203
C	29.22503	5.655642	5.167411	0.0000
R-squared	0.572649	Mean dependent var	2.814708	
Adjusted R-squared	0.523339	S.D. dependent var	0.542349	
S.E. of regression	0.374441	Akaike info criterion	0.996801	
Sum squared resid	3.645358	Schwarz criterion	1.183627	
Log likelihood	-10.95201	F-statistic	11.61329	
Durbin-Watson stat	1.956007	Prob(F-statistic)	0.000052	

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	3.39551	3.01679	0.37872	. *
2	2.76254	2.53027	0.23227	. *
3	2.44842	2.62302	-0.17461	. *
4	2.61080	2.31164	0.29917	. *
5	2.57870	2.75914	-0.18044	. *
6	3.10548	2.77470	0.33078	. *
7	3.12236	2.81258	0.30978	. *
8	3.18013	2.92993	0.25020	. *
9	2.45273	2.69225	-0.23952	. *
10	1.22964	1.74984	-0.52020	* .
11	2.59376	2.99107	-0.39731	* .
12	3.13810	2.86305	0.27504	. *
13	3.00271	2.35378	0.64893	. *
14	3.08694	2.90407	0.18288	. *
15	2.22138	2.84455	-0.62317	* .
16	1.93007	2.36163	-0.43156	* .
17	3.32360	3.56146	-0.23786	. *
18	3.42556	3.27423	0.15133	. *
19	2.73826	2.95227	-0.21401	. *
20	2.47486	2.44208	0.03277	. *
21	2.14124	2.72881	-0.58757	* .
22	2.50144	1.98954	0.51189	. *
23	2.41770	2.57575	-0.15806	. *
24	3.21447	3.03686	0.17761	. *
25	2.76506	2.99368	-0.22862	. *
26	3.18718	3.15506	0.03212	. *
27	3.46948	3.21678	0.25270	. *
28	3.54904	3.32846	0.22058	. *
29	2.64120	3.25593	-0.61474	* .
30	3.73290	3.41202	0.32088	. *

Uji Multikolinearitas

Dependent Variable: LNX1
Method: Least Squares
Date: 03/17/05 Time: 11:03
Sample: 1 30
Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX2	1.542223	1.772261	0.870201	0.3916
C	-4.497834	7.427467	-0.605568	0.5497
R-squared	0.026332	Mean dependent var		1.965057
Adjusted R-squared	-0.008441	S.D. dependent var		0.501963
S.E. of regression	0.504077	Akaike info criterion		1.532165
Sum squared resid	7.114621	Schwarz criterion		1.625578
Log likelihood	-20.98247	F-statistic		0.757249
Durbin-Watson stat	0.892290	Prob(F-statistic)		0.391590

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	2.79423	1.96355	0.83068	.
2	1.90509	2.02650	-0.12141	.
3	1.80171	1.99889	-0.19718	.
4	2.10657	2.03456	0.07201	.
5	1.78002	1.98973	-0.20970	.
6	1.76130	1.96238	-0.20108	.
7	1.45629	1.96868	-0.51239	.
8	1.71019	1.95957	-0.24938	.
9	1.64866	1.94875	-0.30010	.
10	2.44495	2.17339	0.27156	.
11	2.28950	1.95957	0.32993	.
12	1.83258	1.97031	-0.13773	.
13	1.54756	2.07095	-0.52338	.
14	1.68083	1.91850	-0.23767	.
15	2.33408	1.97820	0.35589	.
16	1.25562	1.99798	-0.74236	.
17	1.63900	1.75948	-0.12048	.
18	1.03674	1.82476	-0.78802	.
19	1.57070	1.88862	-0.31792	.
20	1.73519	2.03411	-0.29892	.
21	1.49065	1.92330	-0.43265	.
22	2.18493	2.05341	0.13152	.
23	2.34851	2.08332	0.26520	.
24	1.71199	1.92594	-0.21394	.
25	1.96291	1.94734	0.01557	.
26	1.79840	1.91826	-0.11985	.
27	2.22786	1.91922	0.30864	.
28	3.05494	1.97403	1.08092	.
29	2.76064	1.95933	0.80131	.
30	3.08007	1.81912	1.26095	.

Dependent Variable: LNX1
 Method: Least Squares
 Date: 03/17/05 Time: 11:04
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX3	0.257463	0.162518	1.584206	0.1244
C	-1.750994	2.347388	-0.745933	0.4619
R-squared	0.082259	Mean dependent var		1.965057
Adjusted R-squared	0.049483	S.D. dependent var		0.501963
S.E. of regression	0.489386	Akaike info criterion		1.473010
Sum squared resid	6.705961	Schwarz criterion		1.566423
Log likelihood	-20.09515	F-statistic		2.509708
Durbin-Watson stat	0.849290	Prob(F-statistic)		0.124378

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	0.37872	0.35901	0.01971	*
2	0.23227	0.33288	-0.10061	*
3	0.17461	0.31421	-0.13960	*
4	0.29917	0.40977	-0.11060	*
5	0.18044	0.28208	-0.10164	*
6	0.33078	0.29396	0.03682	*
7	0.30978	0.24175	0.06804	*
8	0.25020	0.24891	0.00129	*
9	0.23952	0.31053	-0.07101	*
10	0.52020	0.50593	0.01427	*
11	0.39731	0.30533	0.09198	*
12	0.27504	0.27449	0.00056	*
13	0.64893	0.30459	0.34434	*
14	0.18288	0.27946	-0.09659	*
15	0.62317	0.33670	0.28647	*
16	0.43156	0.31485	0.11670	*
17	0.23786	0.20888	0.02898	*
18	0.15133	0.16499	-0.01366	*
19	0.21401	0.27309	-0.05908	*
20	0.03277	0.32960	-0.29683	*
21	0.58757	0.29826	0.28931	*
22	0.51189	0.49107	0.02082	*
23	0.15806	0.33842	-0.18036	*
24	0.17761	0.24370	-0.06609	*
25	0.22862	0.27202	-0.04339	*
26	0.03212	0.22876	-0.19665	*
27	0.25270	0.26566	-0.01296	*
28	0.22058	0.30318	-0.08260	*
29	0.61474	0.29517	0.31956	*
30	0.32088	0.38807	-0.06719	*

Dependent Variable: LNX2
 Method: Least Squares
 Date: 03/17/05 Time: 11:04
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX3	0.048261	0.015344	3.145197	0.0039
C	3.494071	0.221629	15.76538	0.0000
R-squared	0.261063	Mean dependent var	4.190635	
Adjusted R-squared	0.234672	S.D. dependent var	0.052817	
S.E. of regression	0.046206	Akaike info criterion	-3.247094	
Sum squared resid	0.059779	Schwarz criterion	-3.153681	
Log likelihood	50.70641	F-statistic	9.892267	
Durbin-Watson stat	1.713640	Prob(F-statistic)	0.003910	

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	2.79423	2.01919	0.77504	*
2	1.90509	2.00550	-0.10041	*
3	1.80171	1.98168	-0.17997	*
4	2.10657	2.18592	-0.07935	*
5	1.78002	1.90310	-0.12308	*
6	1.76130	1.95218	-0.19088	*
7	1.45629	1.84036	-0.38407	*
8	1.71019	1.83850	-0.12831	*
9	1.64866	2.01576	-0.36710	*
10	2.44495	2.33038	0.11457	*
11	2.28950	1.92978	0.35972	*
12	1.83258	1.88830	-0.05571	*
13	1.54756	1.94165	-0.39409	*
14	1.68083	1.94632	-0.26550	*
15	2.33408	1.99867	0.33541	*
16	1.25562	2.04016	-0.78455	*
17	1.63900	1.85111	-0.21211	*
18	1.03674	1.75905	-0.72231	*
19	1.57070	1.95741	-0.38671	*
20	1.73519	2.00993	-0.27474	*
21	1.49065	2.01350	-0.52284	*
22	2.18493	2.38478	-0.19985	*
23	2.34851	1.94272	0.40579	*
24	1.71199	1.84326	-0.13127	*
25	1.96291	1.88116	0.08175	*
26	1.79840	1.79871	-0.00031	*
27	2.23786	1.85266	0.37520	*
28	3.05494	1.83709	1.21785	*
29	2.76064	1.85423	0.90641	*
30	3.08007	2.14863	0.93144	*

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABSU
 Method: Least Squares
 Date: 03/17/05 Time: 09:49
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNx1	0.038489	0.061708	0.623733	0.5382
LNx2	0.323775	0.653577	0.495390	0.6245
LNx3	0.096231	0.063586	1.513397	0.1422
C	-2.514217	2.413175	-1.041871	0.3071
R-squared	0.185300	Mean dependent var		0.307177
Adjusted R-squared	0.091296	S.D. dependent var		0.167602
S.E. of regression	0.159768	Akaike info criterion		-0.706620
Sum squared resid	0.663673	Schwarz criterion		-0.519794
Log likelihood	14.59930	F-statistic		1.971192
Durbin-Watson stat	2.211562	Prob(F-statistic)		0.143045

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1	0.37872	0.35901	0.01971	.
2	0.23227	0.33288	-0.10061	*
3	0.17461	0.31421	-0.13960	.
4	0.29917	0.40977	-0.11060	*
5	0.18044	0.28208	-0.10164	.
6	0.33078	0.29396	0.03682	*
7	0.30978	0.24175	0.06804	.
8	0.25020	0.24891	0.00129	*
9	0.23952	0.31053	-0.07101	.
10	0.52020	0.50593	0.01427	.
11	0.39731	0.30533	0.09198	*
12	0.27504	0.27449	0.00056	.
13	0.64893	0.30459	0.34434	*
14	0.18288	0.27946	-0.09659	.
15	0.62317	0.33670	0.28647	*
16	0.43156	0.31485	0.11670	.
17	0.23786	0.20888	0.02898	*
18	0.15133	0.16499	-0.01366	.
19	0.21401	0.27309	-0.05908	*
20	0.03277	0.32960	-0.29683	*
21	0.58757	0.29826	0.28931	*
22	0.51189	0.49107	0.02082	.
23	0.15806	0.33842	-0.18036	*
24	0.17761	0.24370	-0.06609	.
25	0.22862	0.27202	-0.04339	*
26	0.03212	0.22876	-0.19665	*
27	0.25270	0.26566	-0.01296	.
28	0.22058	0.30318	-0.08260	*
29	0.61474	0.29517	0.31956	*
30	0.32088	0.38807	-0.06719	*